

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Ingin mengetahui Pengaruh Peran Pokdarwis Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Potensi Wisata Di Desa Bogorejo.

2. Kegunaan Penelitian

a. Aspek Praktis

Diharapkan dapat memberi manfaat Desa Bogorejo untuk meningkatkan potensi wisatanya.

b. Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana tentang kajian ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia khususnya mengenai peran Pokdarwis dan pengembangan potensi wisata.

BAB II

LANDASAN TEORI, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS

A. Definisi Partisipasi

1. Pengertian Partisipasi

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, pengertian perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang dalam tujuannya melibatkan kepentingan rakyat, dan dalam prosesnya melibatkan rakyat (baik secara langsung maupun tidak langsung). Tujuan dan cara harus dipandang sebagai satu kesatuan. Suatu tujuan untuk kepentingan rakyat dan bila dirumuskan tanpa melibatkan masyarakat, maka akan sangat sulit dipastikan bahwa rumusan akan berpihak kepada rakyat.

Menurut Theresia, Dkk (2015:196), partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang atau kelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. Keikutsertaan tersebut, dilakukan sebagai akibat dari terjadinya interaksi sosial antara individu yang bersangkutan dengan anggota masyarakat lain. Menurut Adisasmita (2012:34) partisipasi merupakan keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan dalam suatu program atau proyek pembangunan yang dikerjakan didalam masyarakat lokal.

Menurut Beal dalam Mardikanto (2015:81), partisipasi tumbuh karena pengaruh atau tumbuh karena adanya rangsangan dari luar, merupakan gejala yang dapat di indisikan sebagai proses perubahan sosial yang oksogen (*ecogeneous change*). Karakteristik dari proses partisipasi ini adalah, semakin mantapnya jaringan sosial (*sosial network*) yang “baru” yang membentuk suatu jaringan sosial bagi terwujudnya suatu kegiatan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang diinginkan. karena itu, partisipasi sebagai proses akan menciptakan jaringan sosial baru yang

masing-masing berusaha untuk melaksanakan tahapan-tahapan kegiatan demi tercapainya tujuan akhir yang diinginkan masyarakat atau struktur sosial yang bersangkutan.

Sedangkan menurut Hadiwijoyo (2012:18) Partisipasi merupakan aktualisasi dari kesediaan dan kemampuan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam program yang akan dilaksanakan. Peningkatan partisipasi masyarakat merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat secara aktif yang berorientasi pada pencapaian hasil pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat perdesaan.

Berdasarkan pengertian diatas peneliti menyimpulkan bahwa partisipasi merupakan suatu bentuk keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan guna mencapai tujuan. Partisipasi disini lebih banyak ditujukan pada partisipasi masyarakat terhadap program atau kegiatan yang dapat menjadikan masyarakat tidak hanya sebagai objek dalam pembangunan namun juga sebagai subjek dimana masyarakat dapat berperan aktif untuk mencapai hasil yang dilakukan oleh masyarakat perdesaan.

2. Bentuk-Bentuk Partisipasi

Menurut Dusseldorp dalam Theresia, Dkk (2015:200), mengidentifikasi bentuk-bentuk kegiatan partisipasi yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat dapat berupa :

- a. Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat.
- b. Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok
- c. Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat yang lain.
- d. Menggerakkan sumberdaya masyarakat.
- e. Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan.
- f. Memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakatnya.

Bentuk partisipasi menurut Theresia (2015:82) terbagi menjadi 3 tahap, yaitu:

- a. Partisipasi didalam tahap perencanaan (*idea planning stage*).
Partisipasi dalam tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap penyusunan rencana dan strategi dalam penyusunan kepanitiaan dan anggaran pada suatu kegiatan atau proyek. Masyarakat berpartisipasi dengan memberikan usulan, saran dan kritik melalui pertemuan-pertemuan yang diadakan. Menurut Soleh (2014:113), partisipasi masyarakat dalam perencanaan berpengaruh besar terhadap kesuksesan suatu program pembangunan. Hal ini dikarenakan pada tahap perencanaan, masyarakat diberikan diskresi untuk ikut mengambil keputusan dalam merencanakan apa yang ingin mereka bangun sehingga menjadikan mereka sebagai subjek bukan objek dari pembangunan.
- b. Partisipasi di dalam tahap pelaksanaan (*implementation stage*)
Partisipasi dalam tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pelaksanaan pekerjaan suatu proyek. Masyarakat dapat memberikan tenaga, uang, ataupun material atau barang serta ide-ide sebagai salah satu wujud partisipasinya dalam pekerjaan tersebut. partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program merupakan lanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, maupun tujuan.
- c. Partisipasi di dalam pemanfaatan (*utilization stage*)
Partisipasi dalam tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pemanfaatan suatu proyek setelah proyek tersebut selesai dikerjakan. Partisipasi masyarakat pada tahap ini berupa tenaga dan uang untuk mengoperasikan dan memelihara proyek yang telah dibangun. Partisipasi dalam pemanfaatan tidak terlepas dari kualitas maupun kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai. Dari segi kualitas, keberhasilan suatu program akan ditandai dengan adanya peningkatan *output*, sedangkan dari segi kuantitas, dapat dilihat seberapa besar persentase keberhasilan program yang dilaksanakan, apakah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

3. Tingkatan Partisipasi

Wilcox dalam Theresia, Dkk (2015:202), mengemukakan adanya 5 (lima) tingkatan, yaitu dapat dilihat pada gambar 2 dibawah ini :

- a. Memberikan informasi (*Information*)
- b. Konsultasi (*Consulation*) yaitu menawarkan pendapat, sebagai pendengar yang baik untuk memberikan umpan-balik, tetapi tidak terlibat dalam implemementasi ide dan gagasan tersebut.
- c. Pengambilan keputusan bersama (*Deciding together*), memberikan dukungan terhadap ide, gagasan, pilihan-pilihan serta, mengembangkan peluang yang diperlukan guna pengambilan keputusan.

- d. Bertindak bersama (*Acting together*), tidak sekedar ikut dalam pengambilan keputusan, tetapi juga terlibat dan menjalin kemitraan dalam pelaksanaan kegiatannya.
- e. Memberikan dukungan (*Supporting independent community interest*), kelompok-kelompok lokal menawarkan pendanaan, nasehat, dan dukungan lain untuk mengembangkan agenda kegiatan.

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Partisipasi

Slamet dalam Theresia, Dkk (2015:207) mengemukakan beberapa faktor pendukung dalam partisipasi masyarakat, yakni :

- a. Kesempatan untuk berpartisipasi, meliputi:
 - 1) Kemauan politik dari pengusaha untuk melibatkan masyarakat dalam pembangunan, baik dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pemeliharaan, dan pemanfaatan pembangunan, sejak ditingkat pusat sampai di jajaran birokrasi yang paling bawah.
 - 2) Kesempatan untuk memperoleh informasi pembangunan.
 - 3) Kesempatan memanfaatkan dan memobilisasi sumber daya (alam dan manusia) untuk pelaksanaan pembangunan.
 - 4) Kesempatan untuk memperoleh dan menggunakan teknologi yang tepat, termasuk peralatan atau perlengkapan penunjangnya.
 - 5) Kesempatan untuk berorganisasi, termasuk untuk memperoleh dan menggunakan peraturan, perijinan, dan prosedur kegiatan yang harus dilaksanakan.
 - 6) Kesempatan mengembangkan kepemimpinan yang mampu menumbuhkan, menggerakkan, dan mengembangkan serta memelihara partisipasi masyarakat.
- b. Kemampuan untuk berpartisipasi

Perlu disadari bahwa adanya kesempatan-kesempatan yang disediakan atau ditumbuhkan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat akan tidak banyak berarti, jika masyarakatnya tidak memiliki kemampuan untuk berpartisipasi.

Kemampuan yang dimaksud adalah :

 - 1) Kemampuan untuk menemukan dan memahami kesempatan-kesempatan untuk membangun, atau pengetahuan tentang peluang untuk membangun (memperbaiki mutu hidupnya).
 - 2) Kemampuan untuk melaksanakan pembangunan, yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki.
 - 3) Kemampuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan menggunakan sumberdaya dan kesempatan (peluang) lain yang tersedia secara optimal.
 - 4) Kemauan untuk berpartisipasi, utamanya ditentukan oleh sikap mental yang dimiliki masyarakat untuk membangun atau memperbaiki kehidupannya, yang menyangkut :

- a) Sikap untuk meninggalkan nilai-nilai yang menghambat pembangunan.
- b) Sikap terhadap penguasa atau pelaksana pembangunan pada umumnya.
- c) Sikap untuk selalu ingin memperbaiki mutu hidup dan tidak cepat puas sendiri.
- d) Sikap kebersamaan untuk dapat memecahkan masalah, dan tercapainya tujuan pembangunan.
- e) Sikap kemandirian atau percaya diri atas kemampuannya untuk memperbaiki mutu hidupnya.

5. Faktor Penghambat Partisipasi

Soetrisno dalam Theresia (2015:210), menyebutkan faktor-faktor yang dapat menghambat partisipasi masyarakat antara lain :

- a. Belum dipahaminya makna sebenarnya tentang partisipasi oleh pihak perencana dan pelaksana pembangunan. Pada tataran perencanaan pembangunan, partisipasi didefinisikan sebagai kemauan masyarakat untuk secara penuh mendukung pembangunan yang direncanakan dan ditetapkan sendiri oleh pemerintah, sehingga masyarakat bersifat pasif dan sebagai sub-ordinasi pemerintah. Pada pelaksanaan pembangunan di lapangan, pembangunan yang dirancang dan ditetapkan oleh pemerintah didefinisikan sebagai kebutuhan masyarakat, sedang yang dirancang dan ditetapkan masyarakat didefinisikan sebagai keinginan masyarakat yang memperoleh prioritas lebih rendah.
- b. Pembangunan sebagai ideologi baru yang harus diamankan dengan dijaga ketat, yang mendorong aparat pemerintah bersifat otoriter. Kondisi tersebut menimbulkan reaksi balik berupa “Budaya” yang pada gilirannya menumbuhkan keengganan masyarakat untuk berpartisipasi karena dianggap “asal beda”.

Dwiningrum (2013:57-58) mengatakan terdapat 5 kategori yang dapat menghambat partisipasi masyarakat, yaitu :

- a. Sifat malas, apatis, masa bodoh, dan tidak mau melakukan perubahan di tingkat anggota masyarakat
- b. Aspek-aspek tipologis
- c. Geografis (pulau-pulau kecil yang tersebar letaknya)
- d. Demografis (jumlah penduduk)
- e. Ekonomi (desa miskin/tertinggal)

6. Indikator Partisipasi

Menurut Dusseldorp dalam Theresia, Dkk (2015:200), indikator bentuk-bentuk kegiatan partisipasi yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat dapat berupa :

- a. Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat.

- b. Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok
- c. Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat yang lain.
- d. Menggerakkan sumberdaya masyarakat.
- e. Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan.
- f. Memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakatnya.

B. Pariwisata

1. Pengertian Pariwisata

Menurut HadiWijoyo (2015 : 41) pariwisata merupakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan untuk rekreasi, pelancongan, turisme. Parwisata berasal dari bahasa sansekerta yaitu pari yang berarti banyak, penuh atau berputar-putar,dan wisata yaitu perjalanan.

Menurut Idris Abduracman dalam Hadiwijoyo (2015 : 41) Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pariwisata, sedangkan orang yang melakukan wisata disebut dengan wisatawan.

Menurut Undang-Undang No. 9 tahun 1990 tentang kepariwisataan, pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusaha objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha didalam bidang ini.

Menurut WTO dalam Muljadi (2015 : 9) mendefinisikan pariwisata sebagai “ *The activities of person treveling to end stayig in places outside their usual environment for not more than one concecutive year for leisure, business and other purpose* “ atau berbagai aktifitas yang dilakukan orang-orang yang melakukan perjalanan untuk dan tinggal diluar kebiasaan lingkungannya dan tidak lebih dari satu tahun berturut-turut untuk kesenangan, bisnis, dan keperluan lain.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa pariwisata merupakan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain yang berhubungan dengan perjalanan untuk rekreasi, pelancongan, turisme yang dilakukan perorangan atau kelompok untuk tinggal diluar kebiasaan lingkungan tidak lebih dari satu tahun untuk mencari kesenangan, bisnis, dan keperluan lain.

2. Pengertian Prasarana dan Sarana Kepariwisataaan

a. Prasarana Kepariwisataaan

Menurut Muljadi (2015:13) prasarana kepariwisataan adalah semua fasilitas yang mendukung agar sarana pariwisata dapat hidup dan berkembang serta dapat memberikan pelayanan pada wisatawan guna memenuhi kebutuhan mereka yang beraneka ragam, antara lain :

- 1) Prasarana perhubungan, seperti jaringan jalan raya dan jaringan kereta api, bandar udara, pelabuhan laut, terminal angkutan darat dan stasiun kereta api.
- 2) Instalasi tenaga listrik dan instalasi penjernihan air bersih.
- 3) Sistem pengairan untuk kepentingan pertanian, peternakan, dan perkebunan.
- 4) Sistem perbankan dan moneter.
- 5) Sistem telekomunikasi, seperti telephone, internet, pos, televise, dan radio.
- 6) Pelayanan kesehatan dan keamanan.

b. Sarana Kepariwisataaan

Sarana kepariwisataan adalah perusahaan-perusahaan yang memberikan pelayanan kepada wisatawan, baik secara langsung atau tidak langsung dan kelangsungan hidupnya, tergantung dari wisatawan yang datang.

Jenis-jenis sarana pokok kepariwisataan antara lain :

- 1) Perusahaan perjalanan (*Travel agent* atau biro perjalanan wisata)
- 2) Perusahaan angkutan wisata.
- 3) Perusahaan akomodasi
- 4) Perusahaan makanan dan minuman.
- 5) Perusahaan daya tarik wisata dan hiburan
- 6) Perusahaan cinderamata atau *art shops*

3. Objek dan daya tarik wisata

Menurut Hadiwijoyo (2015:49) Objek dan daya tarik wisata adalah suatu bentukan dan fasilitas yang berhubungan, yang dapat menarik minat wisatawan atau pengunjung untuk datang kesuatu daerah atau tempat tertentu. Daya tarik yang tidak atau belum dikembangkan merupakan sumber daya potensial belum dapat disebut sebagai daya tarik wisata sampai adanya suatu jenis pengembangan tertentu. Objek dan daya tarik wisata merupakan dasar bagi kepariwisataan. Objek dan daya tarik wisata dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu :

- a. Objek wisatawan
Objek wisatawan adalah sumber daya alam yang berpotensi serta memiliki daya tarik bagi pengunjung baik dalam keadaan alami maupun setelah ada usaha budi daya.
- b. Objek wisata sosial budaya
Objek wisata sosial budaya dapat dimanfaatkan dan dikembangkan sebagai objek dan daya tarik wisata meliputi museum, peninggalan sejarah, situs arkeologi, upacara adat, kerajinan dan seni pertunjukan.
- c. Objek wisata minat khusus
Objek wisata minat khusus merupakan jenis wisata yang baru dikembangkan di Indonesia. Wisata ini lebih diutamakan pada wisatawan yang mempunyai motivasi khusus.

Perencanaan dan pengelolaan objek dan daya tarik wisata alam, sosial budaya maupun minat khusus harus berdasarkan pada kebijakan rencana pembangunan nasional maupun regional. Apabila kedua rencana tersebut belum tersusun, maka tim perencana pengembangan objek dan daya tarik wisata harus mampu mengamsumsikan rencana kebijakan yang sesuai dengan yang bersangkutan dengan melibatkan peran serta masyarakat setempat.

C. Pokdarwis

1. Pengertian Pokdarwis

Pokdarwis adalah kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung

terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan serta terwujudnya Sapta Pesona dalam meningkatkan pembangunan daerah melalui kepariwisataan dan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.

Kelompok ini bersifat informal sebagai wadah bertukar pikiran, kegiatan, pembicaraan dan pengembangan dalam rangka mencapai tujuan agar wilayah di Kabupaten Pesawaran dapat menjadi wilayah yang mempunyai daya tarik wisata dan menjadi desa wisata. Pembentukan kelompok sadar wisata, sebagai wujud dari konsep pengembangan potensi pariwisata berbasis masyarakat mulai dilakukan pemerintah daerah. Pembentukan pokdarwis ini untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat di sekitar lokasi pariwisata mengenai pentingnya keterlibatan warga secara langsung dalam menjaga serta mengembangkan objek wisata yang ada dimasing-masing wilayah.

2. Tujuan Pembentukan Pokdarwis

a. Maksud pembentukan Pokdarwis

Mengembangkan kelompok masyarakat yang dapat berperan sebagai motivator, penggerak serta komunikator dalam upaya meningkatkan kesiapan dan kepedulian masyarakat di sekitar destinasi pariwisata atau lokasi daya tarik wisata agar dapat berperan sebagai tuan rumah yang baik bagi berkembangnya kepariwisataan, serta memiliki kesadaran akan peluang dan nilai manfaat yang dapat dikembangkan dari kegiatan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

b. Tujuan Pembentukan Pokdarwis

Tujuan dan pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)

sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan posisi dan peran masyarakat sebagai subjek atau pelaku penting dalam pembangunan kepariwisataan, serta dapat bersinergi dan bermitra dengan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan kualitas perkembangan kepariwisataan di daerah.
- 2) Membangun dan menumbuhkan sikap dan dukungan positif masyarakat sebagai tuan rumah melalui perwujudan nilai-nilai sapta pesona bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di daerah dan manfaatnya bagi pembangunan daerah maupun kesejahteraan masyarakat.
- 3) Memperkenalkan, melestarikan, dan memanfaatkan potensi daya tarik wisata yang ada di masing-masing daerah.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Pokdarwis

a. Fungsi

Secara umum fungsi Pokdarwis dalam kegiatan kepariwisataan adalah :

- 1) Sebagai penggerak Sadar Wisata dan Sapta Pesona di lingkungan wilayah di destinasi wisata.
- 2) Sebagai Mitra Pemerintah dan pemerintah daerah(kabupaten/kota) dalam upaya perwujudan dan pengembangan Sadar Wisata di daerah.

b. Tugas

Tugas Kelompok Sadar Wisata di kabupaten adalah sebagai berikut :

- 1) Mendorong dan memotivasi masyarakat agar menjadi tuan rumah yang baik dalam mendukung kegiatan kepariwisataan di daerah.

- 2) Mendorong dan memotivasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan daya tarik wisata setempat melalui upaya-upaya perwujudan Sapta Pesona.
- 3) Meningkatkan pengetahuan dan wawasan para anggota Pokdarwis dalam bidang kepariwisataan.
- 4) Meningkatkan kemampuan dan keterampilan para anggota dalam mengelola bidang usaha pariwisata dan usaha terkait lainnya.
- 5) Mengumpulkan, mengolah dan memberikan pelayanan informasi kepariwisataan kepada wisatawan dan masyarakat setempat.
- 6) Memberikan masukan-masukan kepada aparat pemerintah maupun pihak terkait dalam mengembangkan kepariwisataan setempat.

4. Konsep Pembinaan Pokdarwis

Konsep pembinaan Pokdarwis dalam buku pedoman Pokdarwis adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan pembinaan Pokdarwis
Tujuan pembinaan Pokdarwis adalah meningkatkan pemahaman dan pengetahuan Pokdarwis terhadap posisi, peran dan kedudukannya dalam konteks pembangunan kepariwisataan didaerahnya serta meningkatkan kapasitas dan peran aktif Pokdarwis khususnya dalam mewujudkan sadar wisata dan sapta pesona.
- b. Sasaran pembinaan Pokdarwis
Sasaran pembinaan Pokdarwis adalah meningkatkan kapasitas dan kualitas peranannya, tumbuhnya Pokdarwis di daerah yang mampu bersinergi bersama pemangku kepentingan, serta terciptanya basis data mengenai Pokdarwis yang memadai sebagai dasar pijikan

- perencanaan program pengembangan dan pemberdayaan Pokdarwis dalam mendukung pembangunan kepariwisataan.
- c. Bentuk Pembinaan Pokdarwis
 Bentuk pembinaan Pokdarwis dapat dibagi menjadi 2 model pembinaan, yaitu pembinaan langsung dan pembinaan tidak langsung. Pembinaan langsung yaitu pembinaan yang dilakukan dalam bentuk interaksi dan tatap muka langsung antara unsur Pembina dengan Pokdarwis sebagai pihak yang dibina. Bentuk pembinaan langsung tersebut dapat dilakukan melalui temu wicara, diskusi, pendidikan, dan pelatihan atau worksop, lomba, jambore, dan lain-lain. Sedangkan pembinaan tidak langsung yaitu pembinaan yang dilakukan oleh unsur Pembina melalui pemanfaatan media massa (baik media cetak maupun media elektronik) maupun media publikasi lainnya seperti pemasangan iklan melalui TV dan surat kabar, baliho, poster, spanduk, dll.
- d. Unsur Pembina Kegiatan Pembinaan
 Unsur Pembina Pokdarwis terdiri dari pemerintah, baik ditingkat Pusat maupun tingkat Daerah, serta unsure lain (pihak swasta atau kalangan industri pariwisata maupun asosiasi pariwisata). Dinas di Kabupaten Kota atau Kabupaten yang membidangi pariwisata merupakan Pembina langsung dari Pokdarwis di daerahnya. Sementara itu Pemerintah (Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) dan dinas di tingkat Provinsi yang membidangi Kepariwisataan merupakan Pembina tidak langsung bagi Pokdarwis di daerah (fasilitator atau pendukung perkembangan Pokdarwis di daerah).

5. Keanggotaan

- a. Memiliki dedikasi dan komitmen dalam pengembangan kepariwisataan.
- b. Masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lokasi daya tarik wisata dan memiliki kepedulian terhadap pariwisata.
- c. Mempunyai mata pencaharian atau pekerjaan yang berkaitan dengan penyediaan barang atau jasa bagi kebutuhan wisatawan, baik langsung maupun tak langsung.
- d. Jumlah anggota setiap Pokdarwis, minimal 15 orang.

6. Kegiatan Pokdarwis

Lingkup kegiatan Pokdarwis yang dimaksud di sini adalah berbagai kegiatan yang dapat di progamkan dan dilaksanakan untuk mewujudkan fungsi dan tujuan pembentukan organisasi Pokdarwis. Lingkup kegiatan tersebut meliputi antara lain :

- a. Mengembangkan dan melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan pengetahuan dan wawasan para anggota Pokdarwis dalam bidang kepariwisataan.
- b. Mengembangkan dan melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan kemampuan dan keterampilan para anggota dalam mengelola bidang usaha pariwisata dan usaha terkait lainnya.
- c. Mengembangkan dan melaksanakan kegiatan untuk mendorong dan memotivasi masyarakat agar menjadi tuan rumah yang baik dalam mendukung kegiatan kepariwisataan di daerahnya.
- d. Mengembangkan dan melaksanakan kegiatan untuk mendorong dan memotivasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan daya tarik pariwisata setempat melalui upaya-upaya perwujudan sapta pesona.
- e. Mengumpulkan, mengolah dan memberikan pelayanan informasi kepariwisataan kepada wisatawan dan masyarakat setempat.

- f. Memberikan masukan-masukan kepada aparat pemerintah dalam
- g. mengembangkan kepariwisataa di daerah setempat.

7. Dasar Hukum Pokdarwis

- a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kota Praja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatra Selatan Sebagai Undang-undang.
- b. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- c. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015.
- e. Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata.
- f. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.04/UM.001/MKP/08 tentang Sadar Wisata.

8. Indikator Peran Pokdarwis

Menurut perda No. 56 tahun 2017 Kabupaten Pesawaran tentang pembentukan Pokdarwis menerangkan bahwa peran terbentuknya Pokdarwis sebagai indikator utama keberlangsungan potensi wisata adalah sebagai berikut:

- a. Tuan rumah yang baik.
- b. Kualitas dan daya tarik wisata.
- c. Pengetahuan dan wawasan para anggota pokdarwis.
- d. Kemampuan dan keterampilan para anggota dalam mengelola bidang usaha pariwisata.

- e. Memberikan pelayanan Informasi kepariwisataan kepada para
- f. wisatawan.
- g. Memberikan masukan kepada aparat pemerintah.

D. Kerangka Pikir

Kabupaten Lampung Pesawaran memiliki letak yang strategis dan luasnya wilayah yang terbagi menjadi 11 kecamatan diantaranya yaitu Kecamatan

Gedong Tataan, Kecamatan Kedondong, Kecamatan Negeri Katon,

Kecamatan Padang Cermin, Kecamatan Punduh Pidada, Kecamatan

Tegineneng, Kecamatan Teluk Pandan, Kecamatan Way Khilau, Kecamatan

Way Lima, dan Kecamatan Way Ratai.

Pemerintah Kabupaten Pesawaran saat ini sedang berupaya untuk membuat

strategi baru dengan melibatkan partisipasi masyarakat dengan membangun

peran Pokdarwis dan penguatan komunitas yang membutuhkan strategi

pemberdayaan masyarakat yang secara khusus diharapkan mampu

memperkuat posisi Pokdarwis sebagai mitra pembangunan, yang dalam hal

ini di wakili oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang merupakan

organisasi atau lembaga di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari

pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab dan

berperan sebagai penggerak dalam mengembangkan kepariwisataan dan dapat

meningkatkan pembangunan daerah melalui kepariwisataan bagi masyarakat

didesa wisata. Pokdarwis sebagai salah satu bentuk partisipasi masyarakat

dalam proses kebijakan yang tidak hanya menjadi objek kebijakan tetapi juga

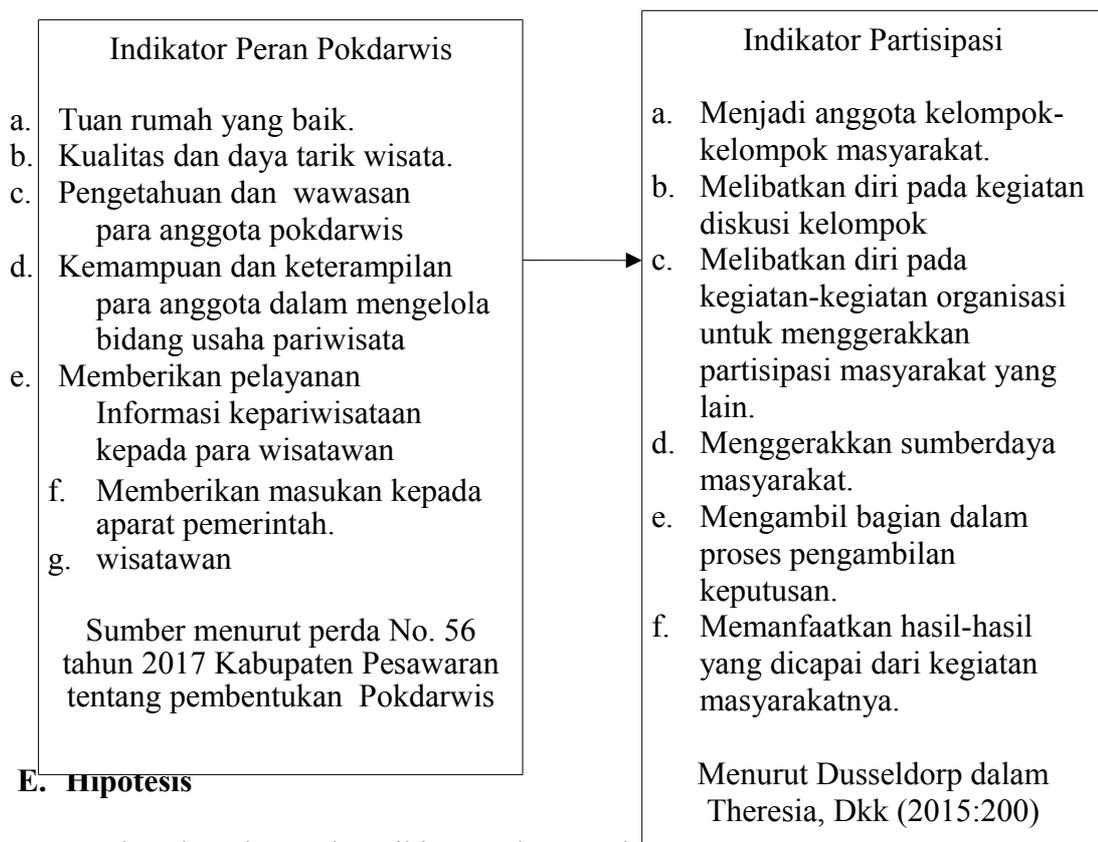
subjek atau memegang peran penting terhadap suatu keberhasilan dalam

mengembangkan kepariwisataan di Desa Bogorejo Kecamatan Gedong

Tataan Kabupaten Pesawaran.

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah keterlibatan pokdarwis dalam tahap perencanaan, pokdarwis dalam tahap pelaksanaan, dan pokdarwis memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari suatu kegiatan sehingga partisipasi masyarakat dalam mengembangkan potensi wisata di bogorejo meningkat. Adapun tujuan Pemerintah melibatkan Pokdarwis dalam pengembangan tersebut karena Pokdarwis memiliki peran memiliki peran untuk menarik para wisatawan untuk datang ke desa wisata dan menjadi daya tarik terhadap wisatawan untuk dapat mengenalkan budaya yang terdapat pada masing-masing desa.

Gambar I. Bagan Kerangka Pikir



E. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pikir tersebut, maka hipotesis dalam penemuan ini dapat dirumuskan sebagai berikut: